

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang sistem pemerintahannya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu ciri dari demokrasi negara Indonesia adalah setiap anggota masyarakatnya turut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Partisipasi pemilih pada Pemilu serentak 2019 di Indonesia sangat tinggi, yaitu mencapai 80,90%. Angka tersebut bahkan melampaui dari target nasional tentang partisipasi pemilih yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu 77,5%.¹ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memilih di Pemilu 2019 membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia semakin baik. Pemilu 2019 membuktikan bahwa rakyat mampu menggunakan haknya untuk terlibat dalam keputusan-keputusan politik. Oleh karena itu, sosialisasi politik kepada masyarakat menjadi sebuah keharusan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia politik.

Sosialisasi politik menurut Gabriel Almond yaitu suatu proses pembentukan sikap, pola serta tingkah laku politik seseorang yang menjadi sarana yang digunakan oleh suatu generasi untuk mengantarkan patokan politik dan kepercayaan politik kepada generasi selanjutnya.² Sosialisasi politik menjadi aspek penting dalam proses interaksi sosial yang meliputi komunikasi antar individu maupun kelompok. Sehingga individu tersebut memperoleh pengetahuan, nilai, sikap, dan acuan perilaku sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan tepat. Sosialisasi politik memberikan ide dan informasi bagi masyarakat untuk dijadikan acuan agar dapat memahami pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan politik di negaranya. Maka, dengan adanya informasi politik dapat dipercaya membantu seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilu.

Menurut Abdul Ghani Al-Rahhal mengemukakan dalam buku *Al-Islamiyyun Sarab Al-Dimuqratiyyah* tentang demokrasi yaitu kekuasaan rakyat oleh rakyat. Hal ini menyatakan bahwa rakyat merupakan sumber kekuasaan. Berbicara tentang demokrasi,

¹ Fitria Chusna Farisa, “KPU Sebut Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen”, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>, diakses 06 April 2022.

²Zulfikri Sulaeman, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, (Jakarta:Kompas Media Nusantara,2010), hlm. 20.

dikalangan ulama dan intelektual maupun aktivis muslim ada kecenderungan yang berbeda.³ Penyelenggaraan pemilu adalah salah satu wujud nyata dari prinsip demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan secara regular guna mengisi suatu jabatan-jabatan publik seperti Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, Kepala dan Wakil Kepala Daerah serta DPRD.⁴

Pemilu yaitu suatu pengakuan serta menjadi perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan juga merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan.⁵ Pemilu merupakan suatu mekanisme dalam demokrasi yang berguna untuk merealisasikan bentuk partisipasi politik masyarakat dalam suatu pemerintahan. Keikutsertaan masyarakat dalam proses politik atau pemerintahan merupakan bentuk dari partisipasi politik. Diantaranya dalam bentuk kompetisi memperebutkan jabatan publik maupun dalam menentukan pejabat untuk mengisi suatu jabatan tertentu (hak untuk dipilih dan memilih). Seringkali, partisipasi politik memerlukan sarana yaitu partai politik. Pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan yang dilakukan secara damai, dimana partai politik berlomba untuk memperebutkan kekuasaan.⁶

Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, menurut Miriam Budiharjo menjelaskan bahwa partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Di negara demokratis menurutnya, partai berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan sebagai sarana pengatur konflik.⁷ Partai politik menjadi salah satu unsur penting pada kehidupan masyarakat dalam politik pemerintahan. Partai politik dapat menghubungkan masyarakat dengan negaranya serta

³Ali Mutakin, *“Islam dan Demokrasi: Kajian Fiqh Siyash Tentang Tantangan dan Hambatan Demokratisasi di Dunia Islam”*, Jurnal Al-Ashriyyah, edisi I, 01 Oktober 2016, hlm.31.

⁴Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.95-96.

⁵Saleh dkk, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 48.

⁶Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 329-330

⁷Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Prima Grafika, 2016), hlm. 403-409.

lembaga-lembaga lainnya. Selain itu, partai politik juga dapat menampung dan menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Partai politik menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yaitu menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi nasional dan dibentuk secara sukarela oleh warga negara atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita guna memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasar pada Pancasila dan UUD 1945.⁸ Partai politik mempunyai tujuan sebagai pendidikan politik atau proses pembelajaran dan pemahaman terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab pada warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹ Maka dari itu setiap orang bebas untuk memilih keyakinan politiknya sendiri, termasuk apabila yang bersangkutan menjadikan keagamaan (agama) sebagai bentuk ekspresi dari keyakinan politiknya. Apabila dalam bentuk ekstrem, keyakinan politiknya itu menyatakan bahwa negara didasarkan pada satu agama tertentu atau bisa dikatakan dengan negara “teokrasi”, atau keyakinan politik marxisme. Keyakinan politik tersebut termasuk didalam kebebasan yang bersifat internal (*freedom to be*) yang tidak bisa dibatasi.¹⁰

Hadirnya partai politik Islam, dapat dilihat dan dipahami dengan jelas, menurut KBBI partai politik adalah suatu perkumpulan yang didirikan guna mewujudkan ideologi politik tertentu. Miriam Budiardjo mengemukakan partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dan anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.¹¹ Seperti yang telah diterangkan diatas, kenyataannya kepentingan umat Islam tidak bisa mencakup dalam satu partai yang berasaskan Islam saja. Hal tersebut dapat dibagi kedalam tiga golongan kepentingan yaitu Golongan Formalis, Golongan Substansialis, Golongan Sekuler.¹²

⁸Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

⁹Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

¹⁰M.M. Billah, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Negara dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Dialog Peradaban*, edisi III, 02 Januari – Juni 2011, Nurcholish Madjid Society (NCMS), hlm.131.

¹¹Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Prima Grafika, 2016), hlm. 403.

¹²Ari Ganjar Herdiansah, “Pragmatisme Partai Islam di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, edisi I, 02 Juni tahun 2017, hlm.

Pertama, Golongan Formalis memilih Islam sebagai ideologi partai secara resmi. Golongan ini memperjuangkan nilai-nilai Islam melalui jalur politik dan berpartisipasi dalam pemilu. Partai-partai berideologi Islam antara lain PPP, PKS, dan PBB.

Kedua, Golongan Substansialis yaitu menjadikan nilai-nilai Islam sebagai substansi kehidupan sosial politik, akan tetapi menolak adanya formalisasi Islam pada negara dan pemerintahan. Golongan ini adalah PKB dan PAN.

Ketiga, Golongan Sekuler menolak inklusi agama (Islam) dalam kehidupan negara dan sistem pemerintahannya, serta berupaya untuk memisahkan domain negara dari agama. Karena golongan ini menganggap adopsi agama kedalam kehidupan politik dan pemerintahan akan mengurangi kualitas kehidupan bernegara, dan juga akan menurunkan makna beragama bagi warganya.

Sementara itu, entitas partai islam telah terbagi dalam dua konsepsi. Pertama, partai yang berasaskan Islam dan kepemimpinannya dibawah kendali orang-orang yang keislamannya tidak diragukan. Serta menyertakan simbol-simbol keislaman dari tanda, logo sampai ke jargon-jargon politiknya. Partai-partai termasuk dalam kategori tersebut adalah PPP, PKS dan PBB. Kedua yaitu, partai yang kepemimpinannya dibawah kendali orang-orang yang beridentitas keislaman, namun asas, logo, jargon maupun perilaku kesehariannya jauh dari nuansa Islam. Partai-partai tersebut, konstituen utamanya berasal dari umat Islam dan ormas keagamaan tertentu, seperti PKB dan PAN.¹³

Berkembangnya zaman dan demokrasi di Indonesia, banyak partai Islam yang mengalami penurunan dalam perolehan suara. Hal ini disebabkan karena proses mobilisasi partai-partai Islam terbilang lemah. Sejarah perolehan suara partai Islam bisa dilihat dari semenjak pemilu pertama sampai pemilu 2019. Keunggulan partai Islam dalam memperoleh pencapaian suara 44% seperti Pemilu 1955 tidak pernah tercapai hingga saat ini. Dalam perjalanan politik elektoral, PKS pada tahun 1999 hanya mendapat suara 1.36%, kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan yaitu sebesar 7.34% dan 7.88% di tahun 2009. Tetapi tahun 2014 PKS mengalami penurunan menjadi 6.92%. Sedangkan, PKB justru mengalami fluktuasi jauh lebih baik, yang

159, https://www.researchgate.net/publication/319447409_PRAGMATISME_PARTAI_ISLAM_DI_INDONESIA_PENDEKATAN_TINDAKAN_SOSIAL, diakses 20 Maret 2022

¹³Ari Ganjar Herdiansah, "Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, hlm. 160.

mana pada pemilu tahun 1999 memperoleh suara 12.62%, kemudian pada tahun 2004 turun menjadi 10.57%, dan di tahun 2009 mencapai titik terendah sebesar 4.95%. Namun PKB mengalami peningkatan yang cukup tajam yaitu pada pemilu 2014 sebesar 9.04%.¹⁴ Indikasi kekalahan partai Islam sebenarnya telah terjadi ketika era masyumi. Penyebab lemahnya partai Islam yang disebutkan oleh Yudi Latif dalam *“Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20”* yaitu partai Islam tidak cukup mendapat dukungan dari masyarakat, para pemimpin Islam tidak memiliki visi dan misi bersama dalam perjuangan politik mereka. Kemudian, jumlah umat muslim di Indonesia secara statistik memang besar, tetapi secara kualitatif kecil, baik dari segi kualitas akidahnya, ibadahnya, akhlakunya, maupun dalam penguasaannya atas pengetahuan umum dan ekonomi.¹⁵

Berbanding terbalik dengan partai-partai nasional yang mengalami stabilitas suara atau bahkan cenderung mengalami kenaikan. Jikalau partai nasional mengalami penurunan, persentasenya tidak menurun begitu drastis. Pada awal reformasi, Golkar kokoh pada Pemilu 1999 dengan perolehan suara sebesar 22.46%, dan pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 14.45%. Sementara itu, PDIP memperoleh kemenangan pada Pemilu 1999 dengan perolehan suara 33.77%, dan mengalami titik terendah yaitu pada tahun 2009 sebesar 14.3%, lalu PDIP kembali memperoleh kenaikan suara dan memenangkan pemilu pada tahun 2014 dengan perolehan suara 18.95%.¹⁶

Dari data tersebut, dapat kita lihat suatu perbandingan. Meskipun mayoritas pemilih di Indonesia adalah muslim, tetap tidak berbanding lurus dengan kenaikan suara partai-partai Islam secara signifikan. Namun sebaliknya, partai-partai sekuler dan nasionalis justru mengalami kenaikan suara dan relatif stabil. Pada pemilu tahun 2019 yang diadakan serentak di Indonesia. Menjadikan pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Diadakannya pemilu serentak sesuai pada Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 yaitu

¹⁴Wahyudi Akmaliah, “Menguatnya Politik Islam, Bukan Partai Islam”, <https://news.detik.com/kolom/d-4148049/menguatnya-politik-islam-bukan-partai-islam>, diakses 20 Maret 2022.

¹⁵Afriza Hanifa, “Ini penyebab Parpol Islam Selalu Kalah”, <https://www.republika.co.id/berita/mlajoy/ini-penyebab-parpol-islam-selalu-kalah> diakses 30 Agustus 2022.

¹⁶Wahyudi Akmaliah, “Menguatnya Politik Islam, Bukan Partai Islam”, <https://news.detik.com/kolom/d-4148049/menguatnya-politik-islam-bukan-partai-islam>, diakses 20 Maret 2022.

bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.¹⁷ Partai Islam pada pemilu 2019 masih belum bisa menjadi poros utama perpolitikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kudus. Dimana pemilu tahun 2019 yaitu untuk pemilihan legislatif dan presiden yang diadakan secara serentak di Indonesia.

Hasil pemilu 2019 di Kabupaten Kudus, KPU Kabupaten Kudus menetapkan PDIP sebagai pemenang yang memperoleh kursi terbanyak yaitu 8 kursi dari 45 kursi. Kemudian PKB dan Golkar masing-masing mendapat 7 kursi, Gerindra 6 kursi, Nasdem 4 kursi, PKS 4 kursi, serta PPP, Hanura dan Demokrat masing-masing 2 kursi. Hasil perolehan tersebut yaitu dari 4 dapil di Kabupaten Kudus.¹⁸ Disini dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Kudus partai nasionalis lebih unggul dari partai Islam. Dalam perolehan suara partai Islam pada pemilu 2019 di Kabupaten Kudus, PKB unggul di Kecamatan Jekulo yaitu sebesar 27.49% dan suara terendah di Kecamatan Undaan yaitu 3.68%.¹⁹

Presentase suara partai Islam paling rendah berada di Kecamatan Undaan. Perolehan suara partai Islam dikecamatan tersebut apabila diakumulasikan maka secara keseluruhan partai Islam mendapatkan 22.64%.²⁰ Perolehan suara partai politik Islam di Kecamatan Undaan secara umum masih kalah jauh jika dibandingkan dengan partai nasional terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kecamatan Undaan menjadi wilayah fokus penelitian peneliti, yang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Kudus ini memiliki andil yang besar dalam menyumbangkan suara partai nasionalis terbanyak diwilayahnya. Wilayah ini dijuluki kandang banteng, bisa dilihat berdasarkan hasil pemilu 2019 di Kecamatan Undaan PDIP mendapatkan 14.292 suara, sedangkan PKB mendapatkan 1.706 suara, PKS mendapatkan 2.410 suara, PPP 3.689 suara, PAN 2.664 suara dan PBB mendapatkan 23

¹⁷Ratnia Solihah, "Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, edisi III, Nomor 1, tahun 2018, hlm. 73 diakses 26 Maret 2022.

¹⁸Akrom hazami, "Pleno KPU Kudus Selesai, PDI Perjuangan Raih Kursi Terbanyak", <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4660183/pleno-kpu-kudus-selesai-pdi-perjuangan-raih-kursi-terbanyak>, diakses pada 06 April 2022.

¹⁹Sumber KPU Kabupaten Kudus.

²⁰Sumber KPU Kabupaten Kudus.

suara.²¹ Padahal penduduk Kecamatan Undaan yang beragama Islam sebanyak 76.120 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada yaitu sebanyak 76.759 jiwa yang ada di Undaan.²² Apabila dipersentasikan yaitu 98.8% masyarakat Kecamatan Undaan adalah muslim. Meski demikian, ternyata pilihan politik para pemeluk Islam di Kecamatan Undaan tak secara otomatis dijatuhkan pada partai Islam. Kondisi sosial masyarakat muslim Undaan yang beragam tidak terlalu menekankan formalisme ataupun simbolisme keagamaan. Pilihan politik mereka menyebar dan terbanyak pada partai nasionalis.

Melihat fenomena demikian, peneliti melakukan penelitian secara mendalam, kenapa hal demikian bisa terjadi. Terlebih kajian yang akan diangkat oleh peneliti berkenaan tentang sosialisasi politik. Dimana sosialisasi politik memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat. Dengan adanya sosialisasi politik kepada masyarakat, akan menjadi salah satu faktor terhadap penggunaan hak politik masyarakat itu sendiri. Kondisi kekalahan partai-partai Islam khususnya di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, peneliti tertarik meneliti pelaksanaan sosialisasi politik partai Islam dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya perolehan suara partai Islam di Kecamatan Undaan. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul skripsi "**Sosialisasi Politik Partai Islam Pada Pemilu 2019 di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus**".

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan menganalisis tentang sosialisasi politik partai Islam. Berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilu legislatif tahun 2019 Kecamatan Undaan dapat diketahui bahwa partai politik Islam memperoleh perolehan suara rendah. Dengan demikian fokus penelitian terhadap sosialisasi politik dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya perolehan suara partai Islam pada pemilu 2019 di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

²¹Sumber KPU Kabupaten Kudus.

²²Kecamatan Undaan dalam angka 2019, Badan pusat statistik kabupaten kudus.

1. Bagaimana sosialisasi politik partai Islam pada pemilu 2019 di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus?
2. Apafaktor yang mempengaruhi minimnya perolehan suara partai Islam pada pemilu 2019 di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pokok permasalahan tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana sosialisasi politik partai Islam pada pemilu 2019 di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minimnya perolehan suara partai Islam pada pemilu 2019 di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan diatas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:

Manfaat secara praktamis:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kajian pemikiran partai politik Islam pada umumnya dan diKecamatan Undaan Kabupaten Kudus pada khususnya.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam penelitian tentang partai politik Islam pada pemilu.
3. Guna mendorong adanya pengembangan penelitian-penelitian politik Islam lainnya dimasa mendatang.

Manfaat secara teoritis:

“Menambah hasanah ilmu pengetahuan mengenai teori Partai Politik Islam”

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembuatan skripsi ini maka diperlukan sistematika penulisan yang baik dan benar untuk diteliti yang telah terbagi menjadi 5 bab yang saling berkesinambungan. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi penyimpangan tujuan dari fokus penelitian. Secara garis besar skripsi terbagi menjadi 3 bagian yaitu bagian awal, isi, dan akhir. Berikut adalah sistematika secara umum:

1. Bagian Awal

Bagain awal terdiri dari sampul luar, sampul dalam, halaman judul, lembar pengesahan proposal, halaman motto dan persembahan,

kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri atas tiga bab, yaitu bab satu dengan bab lain yang saling berhubungan karena merupakan suatu kesatuan yang utuh. Ketiga bab tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah dilakukannya penelitian, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab dua berisi tentang deskripsi dari teori-teori yang relevan terhadap permasalahan yang dikaji. Kerangka teori menjelaskan tentang kajian dari Sosialisasi Politik Partai Islam Pada Pemilu 2019 di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, selain itu pada bab dua ini berisi hasil dari penelitian terdahulu/ literatur review berupa kajian hasil penelitian jurnal, artikel maupun skripsi yang berkaitan dalam masalah yang ditulis peneliti serta kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai Jenis dan Pendekatan Penelitian, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di bab empat ini peneliti akan memaparkan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data tentang Sosialisasi Politik Partai Islam Pada Pemilu 2019 di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dalam hal ini peneliti mengambil lokasi penelitian di DPC PKB, PPP, PBB dan DPD PKS dan PAN di Kabupaten Kudus.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan, dan Saran-Saran.

3. Bagian Akhir

Pada bab ini berisikan Daftar Pustaka yang menjadi referensi peneliti dalam memecahkan masalah sertajuga lampiran-lampiran yang berisi transkrip wawancara dan dokumentasi yang relevan dengan masalah penelitian.

